

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



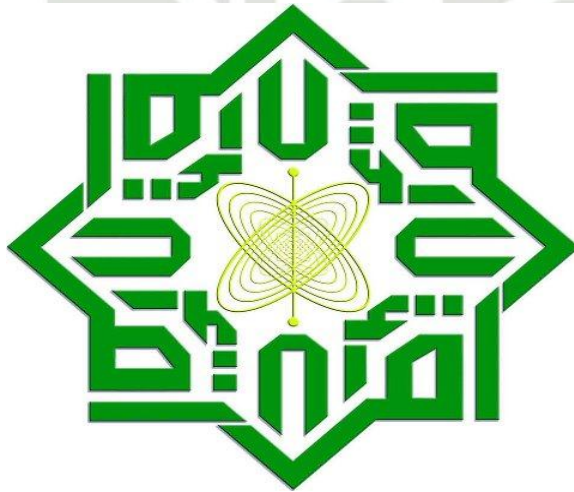
**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS
TANAH PEMBUDIDAYA IKAN (SEHATKAN) OLEH DINAS
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU
DI KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

OLEH :

GINA PRISCA OCTARY

NIM : 11575203228



**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS
TANAH PEMBUDIDAYA IKAN (SEHATKAN) OLEH DINAS
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU
DI KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti oral comprehensive strata 1
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau

OLEH :

GINA PRISCA OCTARY
NIM : 11575203228



**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : GINA PRISCA OCTARY
NIM : 11575203228
FAKULTAS / JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
PEMBUDIDAYA IKAN (SEHATKAN)
OLEH DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PEKANBARU DI
KECAMATAN RUMBAI KOTA
PEKANBARU

DISETUJUI OLEH

DOSEN PEMBIMBING



Ilkhwani Ratna, SE, M.Si
NIP. 19830827 201101 2 014

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. M. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620812 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GINA PRISCA OCTARY
NIM : 1157203228
FAKULTAS / JURUSAN : Ekonomi Dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) Oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
TANGGAL UJIAN : 27 SEPTEMBER 2019


DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI


Drs. H. Almasri, M.Si
NIP. 19670801 200501 1 007

MENGETAHUI

PENGUJI I


Muslim, S.Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002

PENGUJI II


Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130 717 059

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN (SEHATKAN) OLEH DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Oleh :
GINA PRISCA OCTARY

Abstrak Pelaksanaan Program SEHATKAN. Penelitian mengenai Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) di Kecamatan Rumbai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program SEHATKAN yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor – faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan melihat mekanisme pelaksanaan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No 64/PER-DJPB/2016. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru serta Pembudidaya Ikan yang berada di Kecamatan Rumbai, dimana yang menjadi responden ialah Kepala seksi budidaya dan penyuluh serta pembudidaya ikan yang ikut serta maupun tidak pada program SEHATKAN ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi kepada responden penelitian. Setelah data terkumpul kemudian di analisa menggunakan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru masih belum baik. Sedangkan faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan program ini adalah rumitnya persyaratan yang diberikan. Kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada pembudidaya ikan, serta lambatnya proses penerbitan sertifikat tanah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program SEHATKAN, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru” guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian oral komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun bentuk ilmiah. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bermanfaat untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini, terutama kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. H.Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staffnya
3. Bapak DR. Kamaruddin,S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan
5. Bapak Muslim S.Sos, M.Si , selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan
6. Ibu Ikhwani Ratna SE, M,Si, selaku pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Dosen - dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu, dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini
8. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan pembudidaya ikan selaku responden pada penelitian ini
9. Keluarga saya yang telah memberikan do'a dan dorongan moril maupun materil selama hidup saya : yang tercinta dan tersayang Ayahanda Bujang dan Ibunda Nelwati, Abang saya Alfadri, kakak saya Novitra dan Teti Yulia Delfita serta keluarga besar yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kasih sayang serta do'anya.

10. Teman-teman Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2015 Lokal B yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan juga teman-teman selama mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sungai Selodang, Kabupaten Siak.

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis

Gina Prisca Octary

11575203228

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Batasan Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Pelaksanaan	14
2.2 Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan	16
2.2.1 Pengertian Program	16
2.2.2 Tujuan Program	18
2.2.3 Target / Sasaran Program	19
2.3 Sertifikat Tanah	19
2.3.1 Pengertian Sertifikat Tanah	20
2.3.2 Fasilitasi Sertifikat Tanah	21
2.3.3 Mekanisme Pelaksanaan	22
2.3.4 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pembudidaya Ikan.....	27
2.5 Kajian Terdahulu	29
2.6 Menurut Pandangan Islam	32
2.7 Kerangka Berfikir	36
2.8 Definisi Konsep	37
2.9 Konsep Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.4 Metode Analisis	42
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	43
4.1 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.....	43
4.2 Tugas dan Fungsi Pokok	43
4.3 Visi dan Misi.....	43
4.4 Aktivitas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	44
4.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ...	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Identitas Responden	53
5.1.1 Jenis Kelamin Responden.....	53
5.1.2 Identitas Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	54
5.1.3 Tingkat Umur atau Usia.....	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5.2 Pelaksanaan Program SEHATKAN oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.....	55
5.2.1 Sosialisasi Kegiatan.....	56
5.2.2 Identifikasi dan Inventarisasi.....	63
5.2.3 Seleksi dan Verifikasi.....	69
5.2.4 Penyiapan Data.....	71
5.2.5 Penyusunan Daftar Nominatif	72
5.2.6 Penyampaian Daftar Nominatif	73
5.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program SEHATKAN	75
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	78
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Pembudidaya Ikan dan Jumlah Peserta SEHATKAN Pada Tahun 2017-2018 di Kota Pekanbaru	7
Tabel 1.2	Daftar Nama - Nama Pembudidaya Ikan Peserta SEHATKAN di Kecamatan Rumbai Pada Tahun 2018.....	8
Tabel 5.1	Jenis Kelamin Responden	53
Tabel 5.2	Jenis Pekerjaan Responden	54
Tabel 5.3	Tingkat Umur Responden	54
Tabel 5.4	Kegiatan Sosialisasi yang Dilakukan Oleh POKJA Pusat Kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kota	57
Tabel 5.5	Data Kegiatan Sosialisasi yang Diberikan Oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Kepada Pembudidaya Ikan di Kecamatan Rumbai Pada Tahun 2018.....	59
Tabel 5.6	Kriteria Dalam Mengidentifikasi Pembudidaya Ikan Untuk Dapat Mengikuti Program SEHATKAN di Kecamatan Rumbai.....	64
Tabel 5.7	Penyampaian Daftar Nominatif Peserta SEHATKAN di Kecamatan Rumbai.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.5.1	Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	52
Gambar 5.1	Formulir Pendaftaran SEHATKAN	67
Gambar 5.2	Formulir Daftar Nominatif Calon Peserta SEHATKAN	73



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar didunia dengan wilayah laut yang luas dan daratan yang terbagi dalam bentuk kepulauan menjadi karakteristik dan keuntungan tersendiri bagi pembangunan wilayah nusantara. Hasil laut yang melimpah juga diimbangi dengan potensi sumberdaya mineral yang ada di daratan. Dengan potensi yang besar ini memungkinkan untuk melakukan pembangunan secara maksimal diberbagai sektor. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua wilayah merasakan pembangunan yang diharapkan merata kepada semua masyarakat. Salah satunya pada kawasan pesisir yang sangat berhubungan dengan sumberdaya laut dan daratan. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, sektor kelautan Indonesia menyimpan kekayaan bawah laut yang luar biasa. Namun sayangnya, kondisi ini tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang cenderung rendah. Kaya, namun kurang berdaya. Mungkin inilah paradoks yang dapat mendeskripsikan wajah nelayan kita dewasa ini.

Sampai saat ini, masyarakat nelayan sebagai komunitas wilayah pesisir yang relatif tertinggal. Secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan) dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya ditandai oleh kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus Sekolah Dasar (SD) bahkan belum tamat SD, dan lemahnya kapasitas berorganisasi masyarakat.

Kesejahteraan nelayan justru sangat minim, sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan. Data statistik menunjukkan bahwa upah riil harian yang diterima seorang buruh tani dan nelayan hanya sebesar Rp. 30.499,- per hari. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi, sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Untuk itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan nelayan.

Pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berusaha untuk mendukung para nelayan agar terus tumbuh dan berkembang dengan membuat program kerja. Salah satunya permasalahan keterbatasan modal usaha, KKP membuat program Sertifikasi Hak atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) untuk memberikan kepastian hukum atas tanah nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, mengubah predikat modal pasif (liquid capital) menjadi modal aktif (active capital), yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memuntahkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada nelayan di wilayah pesisir pantai maupun pembudidaya ikan seperti keterbatasan keterampilan dan teknologi, rendahnya akses terhadap permodalan, belum adanya insentif moneter bagi nelayan, rantai tata niaga yang merugikan nelayan yang tidak mempunyai aset sebagai modal aktif dan minimnya perlindungan sosial nelayan.

Dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan melalui fasilitasi dan pendampingan kegiatan sertifikasi hak atas tanah. Melalui upaya tersebut diharapkan nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan dapat memperoleh modal usaha untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produk lainnya.

Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematis yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dirjen perikanan budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan dengan sertifikat yang dimiliki maka pembudidaya memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakses pembiayaan. Pasalnya, masih banyak lahan produktif untuk usaha pembudidayaan ikan yang belum bersertifikat. Sementara, harapan pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya sangat besar.

Dalam menjalankan program tersebut hingga di Kabupaten / Kota maka Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau juga menjalankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program ini di Kota / Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. “Secara faktual, nelayan dan pembudidaya ikan di Riau mayoritas tergolong miskin”, ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Sumatera yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang menjadi kegiatan perekonomian didaerahnya. Secara umum provinsi Riau memiliki aktivitas kegiatan budidaya perikanan baik perikanan tangkap dan pengolahan. Dilihat dari sektor budidaya perikanan, di Riau terdapat budidaya air perikanan tawar dan budidaya perikanan laut dan payau. Pengembangan perikanan wilayah pesisir dan laut adalah merupakan tujuan dari pengembangan kawasan. Hal ini adalah untuk mendorong penerapan manajemen pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai skala ekonomi, dengan mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu sistem yang menjadi satu kesatuan. Pengembangan Perikanan pesisir dan laut dipacu untuk berkontribusi pada kenaikan produksi perikanan yang ditargetkan dengan pengembangan kawasan perikanan budidaya dengan konsep pengembangan komoditas unggulan.

Sekretaris Komisi II DPRD Riau, M Mansyur menyatakan bahwa saat ini nelayan di Riau banyak yang tergolong masyarakat miskin. Nelayan juga menjadi kelompok pekerjaan yang membutuhkan dorongan program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Mansyur mengatakan bahwa ada banyak faktor yang membuat nelayan di Riau secara umum masih belum sejahtera. Ada banyak faktor yang membuat nelayan di Riau memiliki pendapatan yang tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentu, seperti kecelakaan, cuaca buruk, pencemaran perairan dan sebagainya. Akibatnya secara umum nelayan di Riau menyumbang angka kemiskinan terbesar.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau didalam tugasnya berupaya bahwa Sektor kelautan dan perikanan untuk menjadi sektor unggulan di Provinsi Riau, yang penjabarannya dilaksanakan dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, tentunya dengan mengedepankan peran semua stake holders sebagai mitra dalam pelaksanaan. Pengembangan perikanan di wilayah pesisir dan laut tidak hanya meningkatkan pendapatan dan produktifitas usaha namun juga dapat meningkatkan daya saing serta berkembangnya kelembagaan bisnis perikanan, tumbuhnya sentra-sentra baru bisnis perikanan, dan pada akhirnya tumbuh dan berkembangnya produk-produk industri yang kreatif.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang salah satu kegiatan masyarakat nya adalah pembudidayaan ikan. Jenis ikan yang biasanya yang di budidayakan adalah ikan patin, ikan lele, ikan gurami dan juga ikan hias. Maka dengan program SEHATKAN melalui pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ini diharapkan potensi perikanan yang ada di kota Pekanbaru bisa berkembang sehingga dapat meningkatkan pondasi ekonomi masyarakat pembudidaya ikan agar mendapatkan kehidupan yang mapan.

Program SEHATKAN di Provinsi Riau mulai diusulkan pada tahun 2016 dan mulai direalisasikan pada tahun 2017. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau maupun dari Dinas Pertanian dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perikanan Kota Pekanbaru bahwa pada tahun 2017, tidak ada pembudidaya ikan di Kota Pekanbaru yang masuk dalam usulan untuk sertifikasi tanah budidaya ikan dikarenakan persyaratannya yang sangat rumit sehingga pembudidaya ikan tidak tertarik untuk mendaftar dalam program ini.

Di kota Pekanbaru banyak pembudidaya ikan yang tersebar, jenis budidaya ikan yang dilakukan antara lain budidaya ikan patin, ikan lele, ikan nila, ikan mas dan ikan hias. namun sangat sedikit pembudidaya ikan yang membuat sertifikat tanah untuk tempat budidaya ikan mereka. Berikut data jumlah pembudidaya ikan yang mensertifikasi tanah budidaya ikan mereka.

Tabel 1.1 Data Jumlah Pembudidaya Ikan dan Jumlah Peserta SEHATKAN Pada Tahun 2017-2018 di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Pembudidaya Ikan		Yang Mensertifikasi	
		2017	2018	2017	2018
1	Sukajadi	6	6	-	-
2	Payung Sekaki	61	61	-	1
3	Tenayan Raya	824	824	-	2
4	Rumbai	431	431	-	6
5	Rumbai Pesisir	457	457	-	-
6	Bukit Raya	221	221	-	-
7	Marpoyan Damai	140	140	-	-
8	Tampan	410	410	-	-
9	Lima Puluh	75	75	-	-
10	Sail	32	32	-	-
Jumlah		2.657	2.657	0	9

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembudidaya ikan yang mensertifikasi tanah nya sangat sedikit dan lokasi yang menjadi peminat terbanyak di Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Rumbai. Menurut penyuluh yang mensosialisasikan program ini kepada pembudidaya ikan, ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi karena pembudidaya ikan masih ada yang belum tertarik untuk mensertifikasi tanah nya dan juga karena persyaratan nya yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2 Daftar Nama-nama Pembudidaya Ikan Peserta SEHATKAN di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018

No	Nama	Alamat Sesuai KTP
1	Dedi Suarsah	Jl. Sripalas RT 03. RW. 03 Kel. Rumbai Bukit
2	Zabur	Jl. Sripalas RT 03. RW. 03 Kel. Rumbai Bukit
3	Jeddi Suarsah Lubis	Jl. Sripalas RT 05. RW. 03 Kel. Rumbai Bukit
4	Beni Riadin	Jl. Padat Karya RT. 04 RW 03 Kel. Rumbai Bukit
5	Syamsimar	Jl. Sripalas RT.01 RW 03 Kel. Rumbai Bukit
6	Syarbani	Jl. T.Maharani RT. 03/05 Kel. Rumbai Bukit

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Melalui upaya SEHATKAN diharapkan nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan di Provinsi Riau salah satunya Kota Pekanbaru dapat memperoleh modal usaha untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya. Namun, masih terdapatnya permasalahan dalam menjalankan program ini.

Permasalahan dalam pelaksanaan program ini di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Rumbai Menurut Ibu Elfidra selaku Kepala Seksi Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru maupun Bapak Masbi selaku penyuluh yang turun ke lapangan adalah persyaratan yang sangat rumit sehingga pada tahun 2017 tidak ada pembudidaya ikan yang ingin mensertifikasi tanahnya. Lalu, para pembudidaya ikan masih sedikit yang tertarik untuk mensertifikasi tanahnya, diantaranya disebabkan karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi yang kurang maksimal dikarenakan sosialisasi yang di berikan tidak keseluruhan pembudidaya ikan tetapi hanya beberapa saja, pengurusannya yang membutuhkan proses yang panjang dan para pembudidaya yang takut akan pajak, lalu permasalahan yang lain yaitu pembudidaya ikan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti kepemilikan tanah harus kepemilikan sendiri namun masih banyak yang kepemilikan tanah masih atas nama orang tua mereka sehingga mereka tidak bisa diproses untuk pembuatan sertifikat tanah .

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Noor Ichsan yang berjudul “Evaluasi Program Sertifikat Hak atas Tanah (SEHAT) Nelayan di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010” Program sertifikat tanah ini telah mampu merubah modal mati menjadi modal aktif yang dapat dijadikan jaminan pinjaman lembaga keuangan namun pemanfaatannya kurang karena para nelayan terkendala, diantaranya rumitnya kredit perbankan, kuatnya ikatan patron klien dan lain-lain karena kurangnya pembinaan pasca sertifikasi.

Lalu penelitian oleh Mahpud, Satyawan Sunito, Idqan Fahmi (2016) tentang “Determinan Kesiediaan Nelayan Mengagunkan Sertifikat Hak atas Tanah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan” menunjukkan status nelayan, pendidikan, luas tanah, memiliki aset lain dan usaha sampingan adalah faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanah yang di peroleh dari “Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah”.

Hal tersebut ditunjukan oleh nilai p-value untuk setiap variabel lebih kecil dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0,10 dan faktor pendidikan mempunyai pengaruh signifikansi yang lebih tinggi 0,009 dibanding faktor lainnya. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu mendorong nelayan untuk menjaminkan/mengagunkan sertifikat hak atas tanah dalam rangka mendapatkan modal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Dan juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ita Fitria Lailatun Ni'mah (2018) mengenai “Peran Akses Pembiayaan Melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan) Dalam Strategi Pengembangan Usaha Akuakultur Budidaya Ikan Oleh Dinas Perikanan Tulungagung”, Kendala akses pembiayaan melalui program SEHATKAN yaitu kendala internal seperti kurangnya dukungan anggaran, kurangnya tenaga teknis (SDM), kurangnya sosialisasi yang dilakukan, dan kendala eksternal seperti masih banyaknya hak atas tanah pembudidaya ikan yang belum bersertifikat, serta masih lemahnya dalam mengakses permodalan, Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dalam mengatasi kendala internal yaitu dengan melakukan koordinasi dengan KKP, KKP Provinsi, dan BPN, Kepala Penyuluh Pusat dalam meningkatkan kapasitas SDM dan anggaran, sosialisasi melalui media soasial. Dan kendala eksternal yaitu menyertifikatkan hak atas tanah milik pembudidaya ikan, dan pengarahan pembiayaan melalui kredit.

Tujuan dari diberlakukannya program SEHATKAN ini agar masyarakat nelayan dapat meningkatkan usaha dan pengembangan ekonomi produktif namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu untuk melakukan



penelitian tentang “Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak atas Tanah Pembudidaya Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program SEHATKAN terhadap pembudidaya ikan di Kecamatan Rumbai ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam menjalankan program SEHATKAN ini ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Program SEHATKAN terhadap pembudidaya ikan yang ada di Kecamatan Rumbai
2. Untuk mengetahui hambatan atau permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan atau ilmu bagi peneliti tentang program SEHATKAN yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam membantu pembudidaya ikan
2. Untuk memberikan rekomendasi terhadap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru
3. Untuk menambah Daftar Pustaka sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka peneliti membatasi penelitian pelaksanaan program SEHATKAN ini di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan definisi, konsep yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Berisikan kajian-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian terdahulu, memuat pandangan Islam, Kerangka pemikiran, definisi konsep dan indikator.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada Bab ini akan dibahas gambaran umum Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan memuat pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai

Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Program SEHATKAN oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam Bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari berbagai pembahasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin Usman. 2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula⁵. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Menurut George C. Edwards III (Ali, 2017:66) Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.2 Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN)

2.2.1 Pengertian Program

Menurut Charles O Jones (Yusriati, 2018:58), program adalah cara yang disahkan untuk pencapaian suatu tujuan. Ada karakteristik yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai suatu program atau tidak, antara lain :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Program membutuhkan staff, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai suatu program
2. Program memiliki anggaran sendiri, program biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. (Jones dalam Ignasia Anggi, Skripsi, 2016 : 13)

Definisi program menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah: “Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.”

Menurut Arikunto (Khiyari, Jurnal, 2017:129) Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam sebuah program terdapat beberapa aspek yaitu berupa tujuan kegiatan, aturan yang harus dipegang dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan, anggaran atau biaya yang digunakan, dan strategi pelaksanaan kegiatan. Melalui program segala sesuatu rencana yang telah disusun dapat dioperasionalkan dengan mudah dan teratur.

Program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Program ini berupa pemberian sertifikat tanah kepada nelayan ataupun pelaku usaha penangkapan ikan. Program yang diselenggarakan melalui kerja sama produktif dalam hal peningkatan status legalitas hak atas tanah pembudidaya ikan yang telah dilakukan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan-Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan atau Pra-Sehatkan.

2.2.2 Tujuan Program

Berdasarkan peraturan direktur jenderal perikanan budidaya nomor 64/per-djpb/2016 tentang petunjuk teknis pra sertifikasi hak atas tanah, manfaat yang diharapkan dari program ini adalah untuk menyiapkan lahan pembudidayaan ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria agar dapat diproses penerbitan Sertifikat hak atas tanahnya, untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki dan selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan kredit pada perbankan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

2.2.3 Target / Sasaran Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1404) Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Menurut Komarudin (Anggi, Skripsi, 2016) target adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang diperoleh, perlu dirumuskan dengan pasti. Sedangkan menurut Winardi () Target adalah sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan.

Target / sasaran dalam Program SEHATKAN ini adalah :

1. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
2. Target Jumlah alokasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Identifikasi Tahun 2018 sebanyak 12 orang.

2.3 Sertifikat Tanah

2.3.1 Pengertian Sertifikat Tanah

Apabila dilihat ketentuan Pasal 19 UUPA ayat (1) yang mengatur tentang pendaftaran tanah menyebutkan, untuk menjamin kepastian hukum,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PP.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa tujuan diadakan pendaftaran tanah oleh pemerintah adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum dimaksud meliputi :

1. Letak tanah dan luas tanah
2. Status tanah dan orang yang berhak atas tanah
3. Pemberian surat berupa sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai bukti yang kuat dan autentik.

Dengan demikian sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional dan diberikan atas permintaan yang berhak, sebagai surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA yang menyatakan tentang pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Menurut pasal 32 PP No.24 Th 1997 :

- a. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

2.3.2 Fasilitasi Sertifikat Tanah

Pemberi Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan adalah Satuan Kerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Bentuk Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Pelaku Usaha penangkapan ikan terdiri dari kegiatan Pra dan Pasca Sertifikasi yang berupa :

1. Koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kab/ Kota;
2. Sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi CPCL dan dokumen alas hak kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nelayan dan Pelaku usaha penangkapan ikan melalui dana pusat dan dekonsentrasi.

3. Penyampaian daftar nominatif CPCL kegiatan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan secara berjenjang
4. Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan, akses produksi dan akses pasar bagi penerima Sertifikat hak atas tanah (SeHAT) Nelayan dan Pelaku usaha penangkapan ikan pasca sertifikasi dalam rangka pengembangan kapasitas nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan.

2.3.3 Mekanisme Pelaksanaan

A. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT)

Pembudidaya Ikan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Pusat melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota lokasi pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi hak atas tanah
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi bersama Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/ Kota melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada petugas kecamatan, desa/ kelurahan, nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan serta pemangku kepentingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup sosialisasi meliputi materi tentang maksud, tujuan, tahapan kegiatan, prosedur penyiapan calon peserta calon lokasi, pensertipikatan hak atas tanah, pendampingan dan fasilitas yang diberikan serta kewajiban calon peserta.

B. Identifikasi dan Inventarisasi

Identifikasi dan inventarisasi calon peserta Pra Sehatkan terkoordinasi oleh Pokja Provinsi dan dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten/Kota.

Proses identifikasi dan inventarisasi calon peserta Pra Sehatkan dimulai dengan pengajuan Surat Permohonan oleh subyek dengan menggunakan Formulir-1, yang dilengkapi data obyek dengan menggunakan Formulir-2 dan Surat Pernyataan Kesanggupan. Kegiatan ini dalam rangka menghimpun usulan dan mengelompokkan ke dalam kriterianya (menurut lokasi atau kelengkapan dokumen).

C. Seleksi dan Verifikasi

Seleksi dan verifikasi calon peserta Pra Sehatkan terkoordinasi oleh Pokja Provinsi dan dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten/Kota. Proses seleksi dan verifikasi calon peserta Pra Sehatkan merupakan kelanjutan dari proses identifikasi dan inventarisasi. Proses seleksi terhadap semua usulan calon peserta Pra Sehatkan dilakukan untuk mendapatkan calon peserta Pra Sehatkan yang memenuhi kriteria yang disyaratkan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, selanjutnya dilakukan proses verifikasi terhadap calon peserta Pra Sehatkan (subyek dan obyek) untuk memeriksa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesuaian data fisik dan data yuridis, termasuk kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh calon peserta Pra Sehatkan.

D. Penyiapan Daftar Nominatif

Berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi, selanjutnya dilakukan penyusunan daftar nominatif calon peserta Pra Sehatkan oleh Pokja Kabupaten/Kota sesuai Formulir-1 dan Formulir-2. Daftar nominatif calon peserta Pra Sehatkan tersebut selanjutnya disampaikan ke Pokja Provinsi untuk diverifikasi kembali dan dikompilasi untuk selanjutnya disampaikan ke Pokja Pusat.

Pelaksanaan penyiapan calon peserta Pra Sehatkan di masing-masing Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. jumlah calon peserta Pra Sehatkan di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kuota yang telah dialokasikan, ditambahkan 10% (sepuluh persen) sebagai cadangan;
2. jika terdapat calon peserta Pra Sehatkan yang berkas permohonannya tidak dapat diproses, maka penggantinya diambil dari cadangan calon peserta Pra Sehatkan sesuai urutannya.

E. Penyusunan Daftar Nominatif

Hasil penyiapan daftar nominatif calon peserta Pra Sehatkan oleh Pokja Kabupaten/Kota dituangkan dalam matriks daftar nominatif calon peserta Pra Sehatkan (menggunakan Formulir-1, Formulir-2, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Formulir-3 yang memuat data subyek dan obyek) serta dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan.

F. Penyampaian Daftar Nominatif

Matriks daftar nominatif yang tersedia (Formulir-3) beserta Surat Pernyataan Kesanggupan, disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja kepada Kepala Dinas Provinsi selaku Ketua Pokja serta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Matriks tersebut disampaikan dalam bentuk softcopy (Formulir-1, Formulir-2, Formulir-3, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) serta hardcopy (Formulir-3).

2.3.4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

A. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh Pokja Pusat, Pokja Provinsi, dan Pokja Kabupaten/Kota terhadap:

1. perencanaan dan penyiapan subyek dan obyek calon peserta Pra Sehatkan;
2. pelaksanaan sosialisasi, identifikasi, inventarisasi, seleksi, dan verifikasi calon peserta Pra Sehatkan;
3. penyusunan daftar nominatif calon peserta Pra Sehatkan (Formulir-1, Formulir-2, Formulir-3 dan Formulir-4) beserta Surat Pernyataan Kesanggupan;
4. penyampaian daftar nominatif beserta surat pernyataan kesanggupan calon peserta Pra Sehatkan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. pelaksanaan pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan Pra Sehatkan dan Sehatkan; dan
6. pelaksanaan pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan Pasca Sehatkan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan oleh Pokja Pusat, Pokja Provinsi, dan Pokja Kabupaten/kota terhadap hasil pemantauan kegiatan Pra Sehatkan, Sehatkan, dan Pasca Sehatkan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Pelaporan

Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Pra Sehatkan, Sehatkan, dan Pasca Sehatkan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan meliputi:

1. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pra Sehatkan, Sehatkan, dan Pasca Sehatkan (Formulir 5);
2. Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Pra Sehatkan, Sehatkan, dan Pasca Sehatkan;
3. Rekomendasi perencanaan dan teknis guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pra Sehatkan, Sehatkan, dan Pasca Sehatkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.4 Pembudidaya Ikan

Dalam Undang-Undang perikanan pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan (Arif Satria, 2015:27).

Kusnadi (Rudianto, 2017:14), mengidentifikasi sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada pelaku usaha perikanan :

- a. Belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu diantara para pelaku pembangunan
- b. Mendorong Pemerintah Daerah (PEMDA) merumuskan *Blue Print* kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan secara terpadu dan berkesinambungan
- c. Masalah isolasi geografis Desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar masuk barang, jasa, kapital dan manusia. Berimplikasi melambatkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan
- d. Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya.
- e. Adanya relasi sosial ekonomi eksploitatif dengan pemilik perahu dan pedagang perantara dalam kehidupan masyarakat nelayan.
- f. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup.
- g. Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria calon subjek dan objek yang dapat mengikuti kegiatan Pra-SEHATKAN antara lain :

1. Warga negara Republik Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai pembudidaya ikan dan/atau suami atau istri pembudidaya ikan
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan domisili tetap, dan/atau surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat
3. Tanah pembudidaya ikan berupa lahan pembudidaya ikan dan non pembudidaya ikan yang belum bersertifikat dan tidak termasuk dalam kawasan hutan
4. Mempunyai surat bukti penguasaan fisik bidang tanah
5. Calon lokasi berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dan merupakan hasil koordinasi dengan Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota agar sesuai dengan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Jadi dari penjelasan diatas, program SEHATKAN ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pembudidaya ikan yang memiliki tanah yang belum disertifikasi sebelumnya.



2.5 Kajian Terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA PENELITI, TAHUN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Noor Ichsan , 2013	Evaluasi Program Sertifikat Hak atas Tanah (SEHAT) Nelayan di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010	Program sertifikat tanah ini telah mampu merubah modal mati menjadi modal aktif yang dapat dijadikan jaminan pinjaman lembaga keuangan namun pemanfaatannya kurang karena para nelayan terkendala, diantaranya rumitnya kredit perbankan, kuatnya ikatan patron klien dan lain-lain karena kurangnya pembinaan pasca sertifikasi.
Mahpud, Satyawati, Sunito, Idqan Fahmi (2016)	Determinan Kesiapan Nelayan Mengajukan Sertifikat Hak atas Tanah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan	Hasil penelitian menunjukkan status nelayan, pendidikan, luas tanah, memiliki aset lain dan usaha sampingan adalah faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanah yang di peroleh dari “Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah”. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai p-value untuk setiap variabel lebih kecil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dari 0,10 dan faktor pendidikan mempunyai pengaruh signifikansi yang lebih tinggi 0,009 dibanding faktor lainnya. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu mendorong nelayan untuk menjaminkan/mengagunkan sertifikat hak atas tanah dalam rangka mendapatkan modal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
Misbak (2018)	Implementasi Kebijakan Program Prioritas Legalisasi Aset Sertifikat Tanah Bagi Nelayan Di Kota Cirebon	Implementasi kebijakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon yang diukur berdasarkan parameter standar dan sasaran sudah baik, parameter sumber daya sudah cukup baik, parameter hubungan antarorganisasi belum baik, parameter karakteristik agen pelaksana belum baik, parameter kondisi sosial, politik dan ekonomi belum begitu baik dan parameter disposisi implementor sudah cukup baik. Dalam implementasi kebijakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah oleh kantor pertanahan Kota Cirebon bagi nelayan Kota Cirebon menemui hambatan-hambatan di antaranya sebagai berikut; a).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Kurang optimalnya dari pihak DKP3 dalam melaksanakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon, b). Kurang koordinasi dari 3 instansi yang terlibat kelurahan, DKP, dan kantor pertanahan dalam hal pembagian tugas, c). Tidak sesuainya waktu pembuatan sertifikat yang telah di targetkan bulan Maret 2014 sudah selesai tapi ditargetkan mundur dari jadwal yang ditentukan, d). Masih adanya pungutan yang dirasakan oleh nelayan dalam pembuatan persyaratan sertifikat.
Ita Lailatun Ni'mah (2018)	Fitria	Peran Akses Pembiayaan Melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan) Dalam Strategi Pengembangan Usaha Akuakultur Budidaya Ikan Oleh Dinas Perikanan Tulungagung	Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, (1) Peran akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menyertifikatkan hak atas tanah milik pembudidaya ikan yang berguna untuk mengakses modal, (2) Dampak yang dirasakan oleh para pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung setelah adanya program SEHATKAN adalah mempermudah mereka mengakses permodalan dari sumber pembiayaan sehingga kebutuhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>dalam usahanya dapat terpenuhi, (3) Kendala akses pembiayaan melalui program SEHATKAN yaitu kendala internal seperti kurangnya dukungan anggaran, kurangnya tenaga teknis (SDM), kurangnya sosialisasi yang dilakukan, dan kendala eksternal seperti masih banyaknya hak atas tanah pembudidaya ikan yang belum bersertifikat, serta masih lemahnya dalam mengakses permodalan, (4) Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dalam mengatasi kendala internal yaitu dengan melakukan koordinasi dengan KKP, DKP Provinsi, dan BPN, Kepala Penyuluh Pusat dalam meningkatkan kapasitas SDM dan anggaran, sosialisasi melalui media sosial. Dan kendala eksternal yaitu menyertifikatkan hak atas tanah milik pembudidaya ikan, dan pengarahannya pembiayaan melalui kredit.</p>
--	--	---

2.6 Menurut Pandangan Islam

Dalam pandangan islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan kuasa (Istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum Nya. Asal-usul kepemilikan adalah milik Allah SWT, manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan dibidang pertanahan hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT ke dalam kebijakan tersebut.

Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah dan memanfaatkannya. Ketentuan hukum tentang tanah berbeda dengan kepemilikan benda lainnya. Ada 3 kata yang disebutkan Allah SWT tentang tanah di dalam Al-Qur'an yaitu Al-Ardhun, Al-Thin dan Al-Turab yang artinya tanah.

Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah didalam Islam akan ditemukan bahwa hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni adanya jaminan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat sekaligus menjamin peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat. Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian tanah. Kepemilikan tanah menurut Islam :

1. Al-milkiyah : hak milik
2. Ijarah : hak sewa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Muzara'ah : hak pakai – hak bagi hasil
4. Ihya al-mawat : membuka tanah
5. Rahn : hak gadai atas tanah

Betapa pentingnya persoalan agraria dalam Islam, tercermin dari kerasnya nada Rasulullah SAW saat menyoroti orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya terhadap tanah orang lain dengan cara yang bathil : “Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim). Hadits tersebut diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Zaid setelah mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uways, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat khalifah Dinasti Umayyah. Merasa direnggut haknya oleh Arwa binti Uways, Sa'id bin Zaid sampai mengucapkan kutukan bahwa jika benar haknya direnggut, “Semoga Allah membutakan matanya dan mematikannya di tanahnya”, yang kemudian terkabul: Arwa hidup buta di sisa hidupnya sampai meninggal.

Kerasnya nada Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa problem agraria telah hadir semenjak era Rasul, dan tampaknya berlarut-larut terus terjadi di kalangan umat Islam di periode-periode kemudian. Penelusuran buku ini menunjukkan bahwa selama berabad-abad setelah Rasulullah SAW wafat, persoalan agraria semakin hadir sebagai persoalan urgen dalam kehidupan umat Islam, sehingga membutuhkan respons yang lebih komprehensif.

Faktor tanah senantiasa menjadi faktor penting dalam konfigurasi sosial umat Islam, sebagaimana direkam oleh Ira M. Lapidus dengan pendekatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“sejarah global”nya dalam A History of Islamic Societies (1988). Tanah dan kepemilikan tanah menjadi faktor-faktor yang menentukan bagi perebutan kekuasaan di kalangan umat Islam, yang dapat memicu pergolakan sosial dalam rupa pemberontakan politik dan perlawanan rakyat jelata. Tanah, dengan demikian, merupakan faktor yang penting bagi kestabilan sekaligus krisis suatu tatanan sosial umat Islam. Namun, kita layak bertanya dengan penuh keheranan: mengapa dengan sedemikian pentingnya persoalan agraria ini, hingga kini umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia, tidak kunjung menemukan format pemikiran yang komprehensif, integral, dan solutif, serta berwawasan jangka panjang tentang suatu “konsepsi agraria yang Islami” Tiadanya format pemikiran ini mengakibatkan kosongnya keberpihakan ideologis umat Islam dalam persoalan agraria. Persoalan agraria tetap dianggap persoalan sekunder yang sewaktu-waktu saja perlu dibahas, namun kembali terlupakan dalam wacana keislaman sehari-hari.

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dalam hal menata penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air adalah bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, namun menolak monopoli. Hal itu dapat dilihat pada fiqih Islam, dimana tanah dapat dimiliki oleh pribadi (haqqu al-tamlik), di samping tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang disebut dengan al-Hima’. Islam dengan ajaran keadilannya itulah yang akan menjadi solusi bagi persoalan penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air umat manusia termasuk di Indonesia.

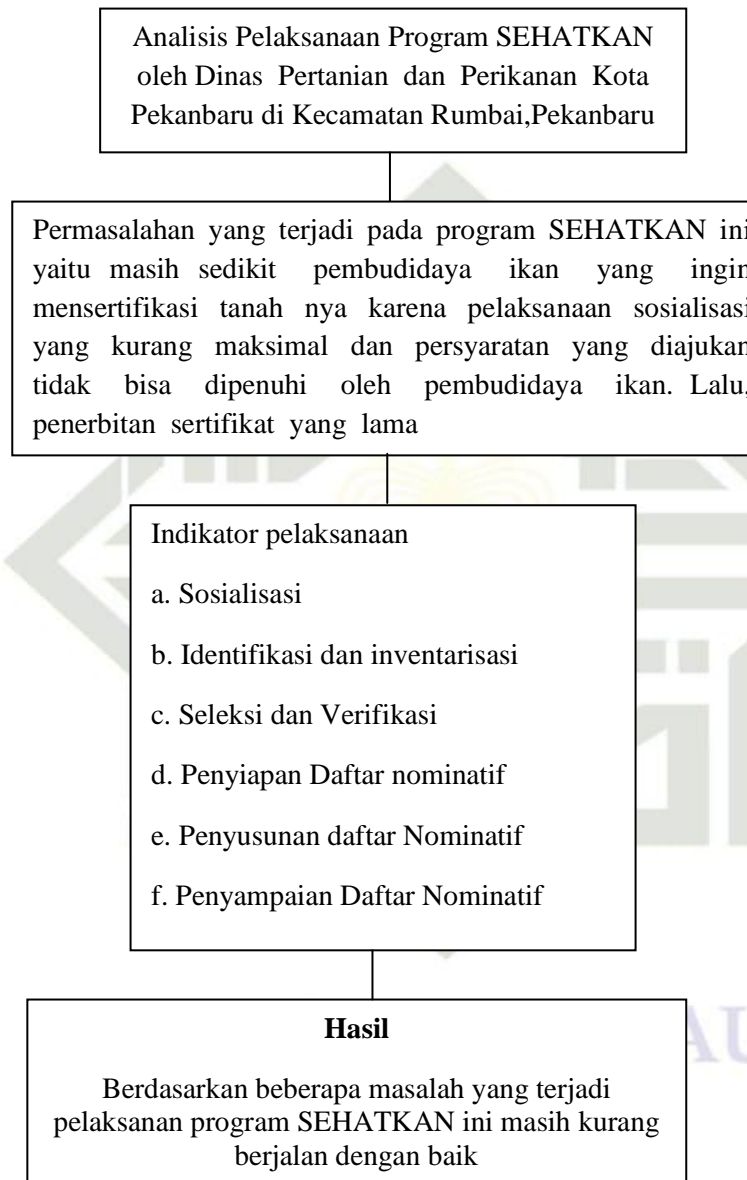


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.7 Kerangka Berfikir



Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 64/PER-DJPB/2016



2.8 Definisi Konsep

1. Pelaksanaan adalah tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam menjalankan program SEHATKAN
2. Program SEHATKAN yaitu suatu unit kerja yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang turut dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk membantu Pembudidaya ikan yang ada di Kecamatan Rumbai agar dapat memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dan diharapkan dapat membantu pembudidaya ikan dalam mengembangkan usahanya, serta memudahkan dalam peminjaman modal.

2.9 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub-Indikator
Pelaksanaan Program SEHATKAN (peraturan direktur jenderal perikanan budidaya nomor 64/PER-DJPB/2016)	1. Sosialisasi kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Kerja (Pokja) Pusat melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota lokasi pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi hak atas tanah b. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/ Kota melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada petugas kecamatan, desa/ kelurahan, nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan serta pemangku kepentingan
	2. Identifikasi dan Inventarisasi	<ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan CPCL dan dokumen alas hak dikoordinasikan dengan Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/ Kota. b. Proses identifikasi dan inventarisasi CPCL dan alas hak dimulai dengan pengajuan Surat Permohonan oleh Subjek Hak (calon peserta) dengan menggunakan formulir 1, yang dilengkapi data Objek Hak (calon lokasi) dengan menggunakan formulir 2.
	3. Seleksi dan Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon peserta Pra Sehatkan yang memenuhi kriteria yang disyaratkan. b. proses verifikasi, untuk memeriksa kesesuaian data fisik dan data yuridis, termasuk kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh calon peserta Pra Sehatkan.
	4. Penyiapan Data	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan CPCL dan dokumen alas hak Kegiatan Fasilitasi SEHATKAN dilakukan melalui proses seleksi dan verifikasi dokumen subjek hak dan objek hak, oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/ Kota melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, sebagaimana tertuang dalam Formulir 1 dan formulir 2, dan disandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan
	5. Penyusunan Daftar Nominatif	a. Hasil penyiapan CPCL dan dokumen alas hak dituangkan dalam matriks daftar nominatif CPCL dengan menggunakan Formulir 3 yang memuat data Subjek Hak (calon peserta) dan Objek Hak (bidang tanah) oleh Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/ Kota
	6. Penyampaian Daftar Nominatif	a. Matriks daftar nominatif yang tersedia (Formulir-3) beserta Surat Pernyataan Kesanggupan, disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja kepada Kepala Dinas Provinsi selaku Ketua Pokja serta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau beralamat di Jl. Pattimura No. 6, Pekanbaru dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Ibrahim Sattah No. 30, Pekanbaru. Waktu Penelitian dilakukan sekitar Bulan Januari hingga Juli 2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Jenis data ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dibantu dengan dokumentasi. Tujuan dari data kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan data.



3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin, 1992 dalam Hadi, 2007). Tanya jawab sepihak berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sementara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan.

Wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Sebagai kriterium, wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain.

Pihak-pihak yang menjadi narasumber atau key informan untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Budidaya Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Ibuk Elvidra Tampubulon, Penyuluh yang ditempatkan di Kecamatan Rumbai pada program SEHATKAN yaitu Bapak Hasbi, 6 Pembudidaya ikan peserta SEHATKAN dan 6 pembudidaya Ikan Non SEHATKAN yang berada di Kecamatan Rumbai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Observasi

Peneliti mengamati secara langsung objek yang diteliti, dimana yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sehingga data yang diperlukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dimana penulis turun langsung kelapangan untuk melihat fenomena ataupun gejala-gejala yang terjadi.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh laporan ataupun data mengenai pelaksanaan program SEHATKAN di Kecamatan Rumbai melalui berkas-berkas dan juga buku-buku tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam menghasilkan kesimpulan dari masalah yang diteliti adalah metode kualitatif karena menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data dari fakta yang ditemukan di lapangan. Peneliti akan menggambarkan secara nyata mengenai pelaksanaan program SEHATKAN di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru merupakan pembantu walikota dalam hal yang berhubungan dengan Pertanian dan Perikanan yang ada di Kota Pekanbaru. Dinas Pertanian dan Perikanan berada di Jl. Ibrahim Sattah No. 30, Pekanbaru. Saat ini Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dipimpin oleh drh. H. Mohd Firdaus, M.Si .

4.2 Tugas dan Fungsi Pokok

Tugas pokok dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ialah “Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan” diantaranya :

1. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
2. Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
3. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan serta Zoonosis.

4.3 Visi dan Misi

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru akan mendukung terlaksananya visi dan misi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walikota Pekanbaru terutama di misi keempat : mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan mice).

Adapun Tujuan dari Misi Keempat ini adalah :

1. Mewujudkan Pekanbaru sebagai Pusat Jasa, Perdagangan dan Industri.
2. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan.

4.4 Aktivitas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Adapun tugas pokok pada masing - masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Dalam Sekretariat Dinas :

- Sub Bagian Umum.
- Sub Bagian Keuangan.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
2. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
6. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Perikanan

Bidang perikanan mempunyai tugas membantu sebagian tugas

Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perikanan.

Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih seta unggul serta pembenihan ikan lainnya, peningkatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.

- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.

- Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alt penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.

- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- Pelaksanaan pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang perikanan.
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan bidang perikanan.
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perikanan.
- Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Perikanan Budidaya
- b. Seksi Perikanan Tangkap
- c. Seksi Penguatan Daya Saing Produk

c. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu sebagian tugas dalam melaksanakan sub urusan peternakan.

Bidang peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijaksanaan umum dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang peternakan.
- b. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pembinaan umum di bidang peternakan, kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan teknis di bidang peternakan.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian izin dan pembinaan usaha di bidang peternakan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- f. Perumusan dan penyusunan laporan evaluasi tahunan dan laporan evaluasi lima tahunan di bidang peternakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pengoordinasi, pembinaan, perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan di bidang peternakan.
- h. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikana oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- b. Seksi Pengembangan Ternak
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan pasca panen
- d. Bidang pertanian

Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pertanian dan perkebunan.

Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- b. Penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

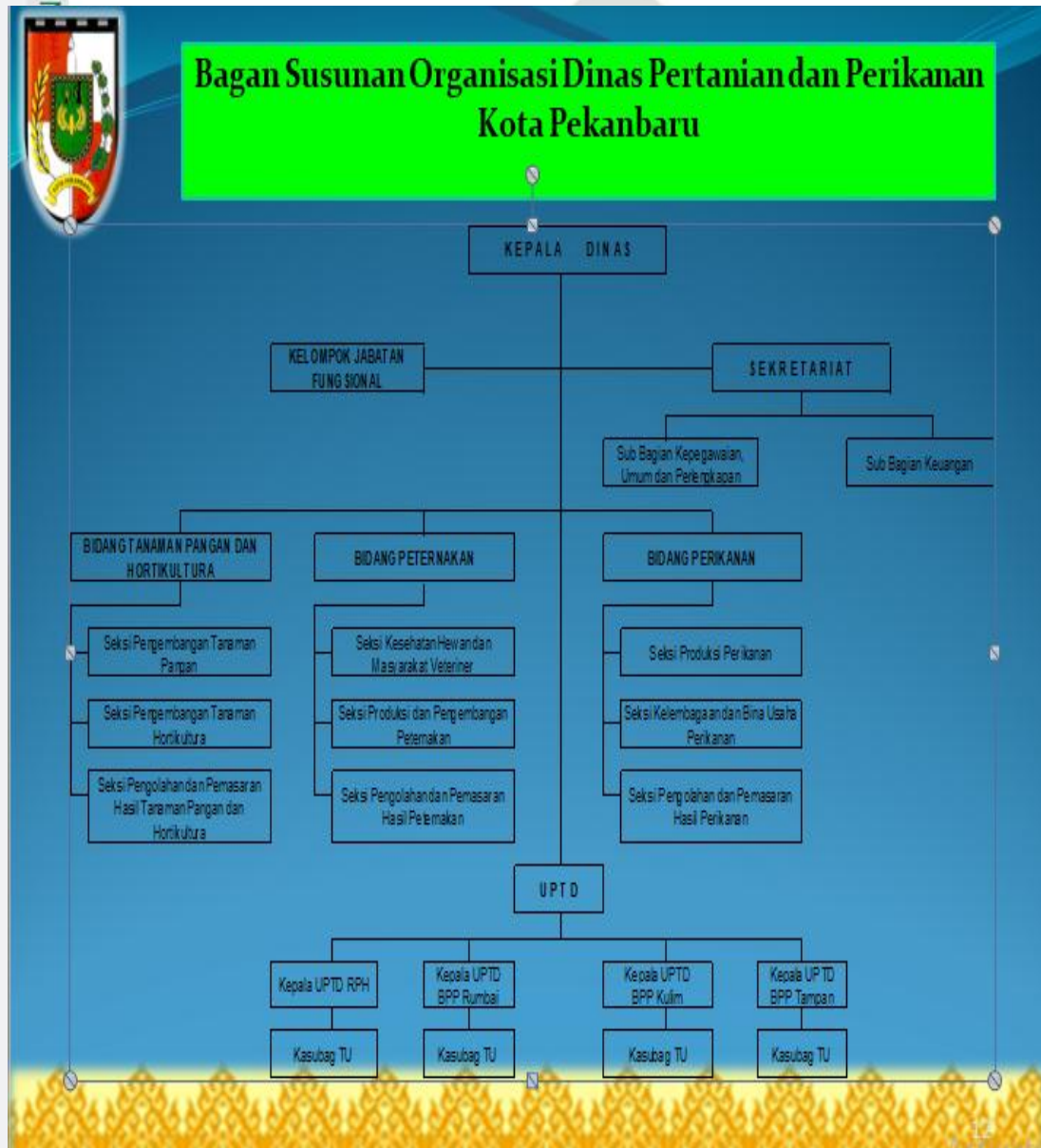
- c. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- d. Penyediaan dukungan, bantuan dan kerjasama di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan di bidang pengembangan tanaman pangan tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Pangan
- b. Seksi Hortikultura
- c. Seksi Perkebunan

4.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Gambar 4.5.1 Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran – saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul analisis pelaksanaan program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru serta hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru di dalam mendukung program SEHATKAN adalah :

1. Pelaksanaan Program SEHATKAN ini belum berjalan dengan baik, diakibatkan kurang maksimalnya kinerja dari pihak terkait yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru. Terutama dalam pelaksanaan sosialisasi yang tidak disosialisasikan kepada seluruh pembudidaya dan juga penerbitan sertifikat yang tidak tepat waktu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persyaratan yang rumit menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program ini pada tahun 2017, sehingga para pembudidaya ikan tidak tertarik untuk mensertifikasi tanahnya. Pada tahun 2018 persyaratannya sudah dipermudah. Namun, pelaksanaan sosialisasi yang diberikan hanya kepada 80 orang pembudidaya ikan di Rumbai dari 431 pembudidaya ikan, sehingga para pembudidaya ikan tidak banyak yang mengetahui hal ini dan paham tentang program ini. Oleh sebab itu hanya sedikit pembudidaya ikan yang ingin mensertifikasi tanahnya. Lalu, sebanyak 6 pembudidaya ikan di Rumbai yang mendaftar untuk mensertifikasikan tanahnya, hingga saat ini belum ada sertifikat yang terbit.

6.2 Saran

1. Penulis menyarankan agar Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru agar lebih gencar dalam mensosialisasikan Program SEHATKAN ini agar banyak masyarakat yang mengetahui kebijakan atau program ini dan sebaiknya pihak BPN pun ikut dalam sosialisasi ini.
2. Penulis menyarankan untuk BPN kota pekanbaru agar meningkatkan kinerjanya agar sertifikat dapat segera terbit dan bisa digunakan dengan semestinya sesuai fungsinya oleh para pembudidaya ikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hidayah, Dedi Amrizal, Yusriati, 2018. *Penanggulangan GOLPUT Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan PILKADA*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan
- Anggraini Gita, 2016. *Islam dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Humadi M Ali, 2016. *Etnografi Bencana*, PT.LKiS Printing Cemerlang, Yogyakarta.
- Usman Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2008, hal 1404
- Rudianto, 2017. *Restorasi Ekosistem Pesisir*, UB Press, Malang.
- Satria Arif, 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program SEHATKAN*, 2016, Pekanbaru
- Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, *Laporan Usulan Nama-Nama Peserta SEHATKAN*, 23 Agustus 2018, Pekanbaru
- Hardiawan Ari, 2015, *Efektivitas program pembinaan dinas sosial pada wanita pekerja seks di kota Cilegon*, Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Ignasia Anggi. 2016. *Efektivitas dan Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau*. Skripsi. Universitas Lampung. Lampung
- Khiyari Nuwile Ard, Zulaika Siti, dkk. 2017. Evaluasi Program Mahasiswa (PMW) di Universitas Negeri Jakarta. Jurnal, Universitas Negeri Jakarta. Jakarta
- Sumenge Ariel Sharon. 2013. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widiastuti Reni, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/Pdt.G/1999/PN Kray)*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abdul Latif. 2018. DPRD : Masih Banyak Nelayan di Riau yang Miskin di <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/05/01/dprd-masih-banyak-nelayan-di-riau-yang-miskin#sthash.vCvKaB3D.dpbs> (diakses 22 Mei)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Rapat Koordinasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan Provinsi Riau Tahun 2017 di <http://dkp.riau.go.id/web/berita/detail/70/dinas/rapat-koordinasi-sertifikasi-hak-atas-tanah-sehat-nelayan-provinsi-riau-tahun-2017> (diakses 22 Mei)

Fauzi Kamal Ismail. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Memuat Penyempurnaan Dan Penegasan Yang Mampu Menjadi Landasan Hukum Dan Operasional Bagi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Yang Lebih Cepat di <http://fauzie.weblog.esaunggul.ac.id/2015/06/26/penjelasan-pasal-32-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/> (diakses 14 November)

Nella Marni. 2016. Sebagai Bentuk Upaya Perlindungan, Diskanlut Riau Kasih Nelayan Kartu SEHAT <https://www.antarariau.com/berita/70152/sebagai-bentuk-upaya-perlindungan-diskanlut-riau-kasih-nelayan-kartu-sehat> (diakses 22 Mei)

Remon Samora.2018. Akses Keuangan Bagi Kaum Nelayan di <https://news.detik.com/kolom/d-3979437/akses-keuangan-bagi-kaum-nelayan> (Diakses 5 Januari 2019)

Satria. 2017. Melirik Potensi Perikanan Pesisir dan Laut di Provinsi Riau di http://dkp.riau.go.id/web/berita_dinas/detail/40/dinas/melirik-potensi-perikanan-pesisir-dan-laut-di-provinsi-riau (Diakses 22 Mei)

WAWANCARA

Dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

1. Seperti apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Pokja Pusat, Pokja Provinsi dan Pokja Kab/Kota dalam mensosialisasikan program SEHATKAN kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan program ini ?
2. Kapan sosialisasi mulai dilakukan oleh penyuluh?
3. Berapa orang yang mendapatkan sosialisasi tentang Program SEHATKAN ini?
4. Kriteria seperti apakah yang sering pembudidaya ikan tidak penuhi sehingga para pembudidaya tidak bisa mensertifikasi tanah nya?
5. Kenapa hanya sedikit pembudidaya ikan yang mendaftar program SEHATKAN ini?
6. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program SEHATKAN?
7. Apa strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Pengguna SEHATKAN

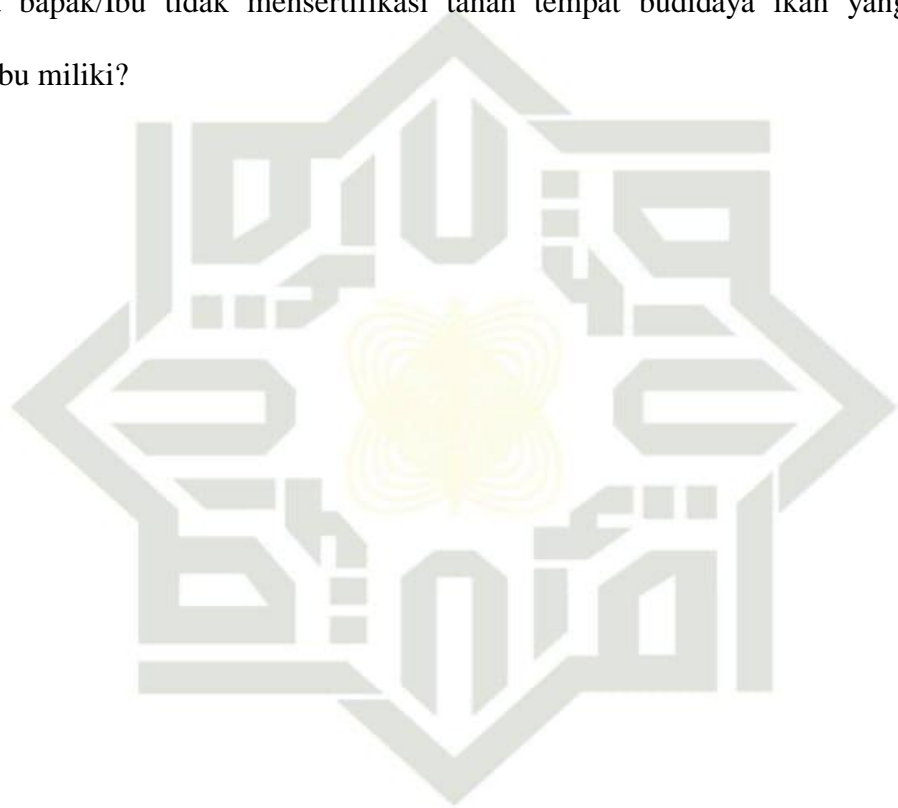
1. Kapan bapak/Ibu mendapatkan sosialisasi tentang program SEHATKAN?
2. Mengapa bapak/ibu tertarik dalam membuat sertifikat tanah untuk tempat budidaya ikan?
3. Apa kendala dalam program SEHATKAN ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembudidayaan ikan non SEHATKAN

1. Apakah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah mensosialisasikan program Ini ke daerah Bapak/Ibu ?
2. Kenapa bapak/Ibu tidak mensertifikasi tanah tempat budidaya ikan yang bapak/ibu miliki?



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2737/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 09 April 2019 M
3 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. **Ikhwan Ratna, SE, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Gina Prisca Octary
NIM : 11575203228
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/21634
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2738/2019 Tanggal 9 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

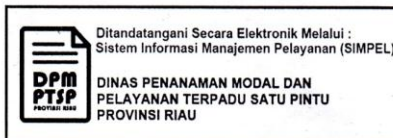
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | GINA PRISCA OCTARY |
| 2. NIM / KTP | : | 11575203228 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
PEMBUDIDAYA IKAN (SEHATKAN) OLEH DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU DI KECAMATAN RUMBAI KOTA
PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 April 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY-OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2738/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 09 April 2019 M
3 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

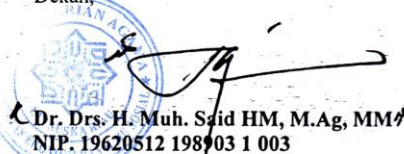
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Gina Prisca Octary
NIM. : 11575203228
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya
Ikan (SEHATKAN) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

JALAN IBRAHIM SATTAH NO. 30 TELP. (0761) 26095 FAX (0761) 7870142
PEKANBARU

KODE POS 28131

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 523.070/Distankan-Perikanan/513

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. H. Syahmanar S. Umar, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gina Prisca Octary
NIM : 115752023228
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Analisis Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) Oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru
Lokasi Penelitian : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Telah melaksanakan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) Oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 07 Agustus 2019

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kota Pekanbaru



Ir. H. Syahmanar S. Umar, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610606 199212 1 001



State Islamic University of Suriah Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO PENELITI BERSAMA RESPONDEN (PEGAWAI DINAS)



- a. Pengumpulan nanya untuk kepentingan penelaikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpurkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO PENELITI BERSAMA RESPONDEN (PEMBUDIDAYA IKAN PESERTA SEHATKAN)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnankan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



FOTO PENELITI BERSAMA RESPONDEN (PEMBUDIDAYA IKAN NON SEHATKAN)

Hak cipta Diinaungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengumpulan nanya untuk kepentingan pencaikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



FOTO PENELITI BERSAMA PEMBUDIDAYA IKAN PESERTA SEHATKAN



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama GINA PRISCA OCTARY, lahir pada tanggal 30 Oktober 1996. Penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara dari ayahanda bernama Bujang (alm) dan ibunda bernama Nelwati (almh). Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 2 Padang pada tahun 2002, kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri 15 Padang Pasir, Padang (lulus pada tahun 2008). Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Padang (lulus pada tahun 2011) dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Padang (lulus pada tahun 2014). Setelah menyelesaikan pendidikan di SMAN 8 Padang penulis melanjutkan studi S1 pada tahun 2015 dengan mengambil Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, Pekanbaru.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan penulis juga telah menyelesaikan Program Pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Riau.

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) Oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”**. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasah (*Oral Comprehensive*) pada tanggal 27 September 2019 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau dan alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dengan predikat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)